



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
NOMOR : 1604/DJU/SK/HK 00.3/7/2018**

TENTANG

**PENUNJUKAN PESERTA SOSIALISASI
KEMUDAHAN BERUSAHA BAGI APARATUR PENGADILAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan program Mahkamah Agung RI dalam hal kemudahan berusaha di pengadilan, maka perlu diadakan sosialisasi mengenai pencatatan perkara di pengadilan secara elektronik (aplikasi e-Court);
 - b. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Implementasi Aplikasi e-Court (e-Filing, e-Payment, e-Summons), perlu dilaksanakan sosialisasi untuk memperkenalkan dan meningkatkan kemampuan aparatur pengadilan dalam penggunaan aplikasi e-Court (e-Filing, e-Payment, e-Summons);
 - c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut perlu menunjuk peserta yang namanya tercantum dalam keputusan ini;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
 3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik;
 4. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 305/SEK/SK/VII/2018 tanggal 2 Juli 2018 tentang Penunjukan Pengadilan Percontohan Pelaksanaan Uji Coba Administrasi Perkara Secara Elektronik;
 5. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi Di lingkungan Peradilan Umum;
 6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 271/DJU/SK/ PS01/4/2018 Tanggal 17 April 2018 Tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik;
 7. DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2018 Nomor SP DIPA-005.03.1.097450/2018 tanggal 5 Desember 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TENTANG PENUNJUKAN PESERTA SOSIALISASI KEMUDAHAN BERUSAHA BAGI APARATUR PENGADILAN TAHUN ANGGARAN 2018.**

KESATU : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk mengikuti Sosialisasi Kemudahan Berusaha Bagi Aparatur Pengadilan.

KEDUA : Peserta dibebaskan dari pekerjaan selama mengikuti kegiatan tersebut, mulai tanggal 1 Agustus sampai dengan 3 Agustus 2018.

KETIGA : Setiap Pengadilan Negeri wajib melakukan sosialisasi atas materi yang diterima selama mengikuti Sosialisasi Kemudahan Berusaha Bagi Aparatur Pengadilan dan mengirimkan laporan sosialisasi tersebut ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum cq Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas tersebut dibebankan sepenuhnya kepada DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor SP DIPA-005.03.1.097450/2018 tanggal 5 Desember 2017.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2018



**DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM,**

[Handwritten Signature]
Dr. H. HERRI SWANTORO, S.H., M.H.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
5. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Pengadilan Tinggi Medan, Pengadilan Tinggi Padang, Pengadilan Tinggi Jambi, Pengadilan Tinggi Bengkulu, Pengadilan Tinggi Semarang, Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Samarinda, Pengadilan Tinggi Kupang, Pengadilan Tinggi Makassar, Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Pengadilan Tinggi Bandung, Pengadilan Tinggi Ambon, Pengadilan Tinggi Pontianak, Pengadilan Tinggi Maluku Utara;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta;
7. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Ditjen Badilum;
8. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**NAMA PESERTA SOSIALISASI
KEMUDAHAN BERUSAHA BAGI APARATUR PENGADILAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

NO.	N A M A	N I P	GOLONGAN	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	EDY PRAMONO, S.H., M.H.	19600828 198612 1 001	IV/d	KETUA PENGADILAN NEGERI JAMBI
2.	DJAMALUDDIN ISMAIL, SH, MH	19640529 199212 1 001	IV/d	KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA
3.	BONGBONGAN SILABAN, S.H., L.L.M.	19681225199212 1 001	IV/c	KETUA PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO
4.	SUWONO, SH., M.Hum	19630101 199212 1 001	IV/c	KETUA PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH
5.	BAMBANG HERY MULYONO, SH, MH	19650514 199303 1 004	IV/c	KETUA PENGADILAN NEGERI PADANG
6.	ALBERTUS USADA, SH., MH	19630927 199212 1 001	IV/c	KETUA PENGADILAN NEGERI KLATEN
7.	ANDREAS PURWANTYO SETIADI, SH., MH	19650521 199212 1 001	IV/c	KETUA PENGADILAN NEGERI GRESIK
8.	ABDUL HALIM AMRAN, SH, MH	19621209 198803 1 001	IV/c	KETUA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA
9.	SAIFUL ARIF, SH., MH	19621011 199212 1 002	IV/c	KETUA PENGADILAN NEGERI KUPANG
10.	H. MOH MUCHLIS S.H.,M.H.	19630217 199212 1 001	IV/c	KETUA PENGADILAN NEGERI AMBON
11.	H. SUMEDI, SH., MH	19621116 199212 1 001	IV/c	KETUA PENGADILAN NEGERI MARTAPURA
12.	ANNAS MUSTAQIM, S.H., M.Hum.	19660620 199203 1 006	IV/c	WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM
13.	SUTARJO, S.H MH	19671127 199212 1 001	IV/c	WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK
14.	MOEHAMMAD PANDJI SANTOSO S.H.,M.H.	19700218 199603 1 003	IV/c	WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI TERNATE
15.	SUDIRA, S.H., M.H.	19640814 199212 1 001	IV/b	KETUA PENGADILAN NEGERI SUMEDANG

NO.	N A M A	N I P	GOLONGAN	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
16.	IRFANUDIN, SH., MH	19630808 199212 1 001	IV/b	KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKULU
17.	SYAMSUL ARIEF ,S.H. M.H.	19760224 199903 1 002	IV/a	KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH
18.	TURIJAN, SH	19630918 198503 1 004	III/d	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TINGGI BENGKULU
19.	JANSEN TERKELIN TARIGAN, S.Kom	19790121 200904 1 003	III/d	STAF IT PENGADILAN TINGGI MEDAN
20.	St NINA MAULIA, S.T.	19861119 200912 2 005	III/d	STAF IT PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
21.	WIJAYA BINU KAMDANI, SH., MM	19720323 199203 1 004	III/c	KASUBBAG PERENCANAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN PN KLATEN
22.	MUHAMMAD ANDRIANSYAH, S.T., S.H.	19821224 200912 1 004	III/c	STAF IT PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN
23.	SIDIK NUGRAHA, S.Kom	19860410 200912 1 002	III/c	STAF IT PENGADILAN TINGGI BANDUNG
24.	FEBY AKIAAR, S.Kom., S.H	19811002 200904 2 007	III/c	STAF IT PENGADILAN NEGERI AMBON
25.	DEWI ZUBAIDAH, S.T	19861221 200904 2 004	III/c	STAF IT PENGADILAN NEGERI TERNATE
26.	FEBY MARIANE MALELAK, S.Kom	19840220 200904 2 006	III/c	STAF IT PENGADILAN TINGGI KUPANG
27.	FRANSISCO PALANG AMA, S.T	19840929 201101 1 011	III/b	STAF IT PENGADILAN TINGGI AMBON
28.	ANUGRAH NAHARI, S.Kom	19840712 201101 1 008	III/b	STAF IT PENGADILAN TINGGI SURABAYA
29.	YOGI PRASETIONO, SE., SH	19810921 200912 1 001	III/b	STAF IT PENGADILAN TINGGI SEMARANG
30.	MISBAH, ST	19840327 200912 1 002	III/b	STAF IT PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH
31.	ARMAN SENJAYA, ST	19830614 200604 1 005	III/b	STAF IT PENGADILAN NEGERI PADANG
32.	IBNU, S.T	19870719 201101 1 008	III/b	STAF IT PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
33.	BUDIYANTO, A.Md	19771012 200904 1 002	III/a	STAF IT PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

NO.	NAMA	NIP	GOLONGAN	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
34.	INGGOU DAVID PURBA, S.Kom	19880707 201503 1 002	III/a	STAF IT PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
35.	TRIONO, A.Md	19830920 200904 1 004	III/a	STAF IT PENGADILAN NEGERI JAMBI
36.	BERTO HIDAYAT, A.Md	19800801 200912 1 002	III/a	STAF IT PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO
37.	KUSWANDI	19830826 201408 1 001	III/a	STAF IT PENGADILAN NEGERI GRESIK
38.	APRIJAL KURNIAWAN	19810403 200604 1 005	III/a	STAF IT PENGADILAN NEGERI SAMARINDA
39.	BAMBANG ANDI SAPUTRO, S.Kom	19890816 201503 1 002	III/a	STAF IT PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA
40.	ARENI, A.Md	19840404 200912 2 003	II/d	STAF IT PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM
41.	ISNANI KURNIA PUTRI, A.Md	19910820 201503 2 004	II/c	STAF IT PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG
42.	RAHMAWATI	19820711 201405 2 001	II/a	STAF IT PENGADILAN TINGGI JAMBI
43.	BAMBANG PURNOMO			STAF IT PENGADILAN NEGERI MARTAPURA
44.	ISMET MULYADI, A.Md	-	-	HONORER PENGADILAN TINGGI PADANG
45.	ZAKI NASRI	-	-	STAF IT PENGADILAN NEGERI BENGKULU
46.	STEVENSON KAWA	-	-	HONORER PENGADILAN NEGERI KUPANG
47.	ERWIN WIDIARTO	-	-	STAF IT PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH
48.	DENY ROMANSYAH SAYAMAN	-	-	STAF IT PENGADILAN NEGERI SUMEDANG

DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM,



Dr. H. HERRI SWANTORO, S.H., M.H.